

KONFLIK ELIT LOKAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MALUKU UTARA

Rusdi J. Abbas

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik Marmara University Istanbul, Turki

Email: rusdi.jarwo.abbas@gmail.com

ABSTRACT

This research explains on local elite conflict that happened in the election of regional leader of North Maluku 2007-2008. This research uses inductive approach with literature and in-depth interview. The area of this research is Ternate City. The result of this research shows that local elite contention happened in some areas confronting them, either in small arenas or big arenas. The source of this conflict was taken from province of North Maluku 1999 formation, behind of Abdul Gaffur and Thaib Armayin's elite local emulation and regional leader election of North Maluku 2001-2002. Otherwise, configuration of local elite existing in North Maluku is divided into three big parts. They were traditional elite, new elite, and local elite. The Election of regional leader of North Maluku 2001-2002 could be said as an arena contention of elite local of North Maluku which happened in big scale, in this arena Abdul Gaffur who won the previous election, finally had to fail tragically and was removed by Thaib Armayin.

Keywords: Local elite conflict, local elite configuration, local elite arena.

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang konflik elit lokal yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Maluku Utara 2007-2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan metode kajian literatur dan wawancara. Lokasi penelitian di Kota Ternate. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pertarungan antara elit lokal terjadi dalam beberapa arena, baik di arena yang berskala kecil maupun di arena besar. Konflik yang terjadi berakar dari pembentukan provinsi Maluku Utara 1999, persaingan elit lokal di belakang Abdul Gaffur dan Thaib Armayin, dan pemilihan kepala daerah Maluku Utara 2001-2002. Konfigurasi elit lokal yang ada di Maluku Utara sendiri terbagi dalam tiga bagian besar, yaitu elit tradisional, elit baru, dan elit lokal. Pemilihan kepala daerah Maluku Utara 2001-2002 bisa dibilang merupakan arena pertarungan elit lokal Maluku Utara yang terjadi dalam skala besar, dalam arena ini Abdul Gaffur yang sebelumnya memenangkan pemilihan, akhirnya harus kalah dari Thaib Armayin.

Kata kunci: Konflik elit lokal, Konfigurasi elit lokal, Maluku Utara.



PENDAHULUAN

Sebagai provinsi baru, Maluku Utara (Malut) telah dua kali melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). *Pertama*, Pilkada Malut 2001-2002 yang dipenuhi konflik dan kemudian dimenangkan oleh pasangan Thaib Armayin dan Madjid Abdulah secara dramatis, setelah mengalahkan pasangan Abdul Gaffur dan Yamin Tawari secara tragis, yang sebelumnya telah memenangkan Pilkada Malut 2001-2002. Kemudian yang *Kedua*, Pilkada Malut 2007-2008, yang diikuti empat pasang kontestan ini, kembali lagi mempertemukan Abdul Gaffur dan Thaib Armayin dalam satu arena pertempuran, yang sekali lagi sebagai kompetitor.

Pertemuan Abdul Gaffur dan Thaib Armayin yang kedua kalinya ini, menjadi sesuatu yang menarik dikarenakan sejarah pertarungan keduanya di masa lalu. Di samping itu, keduanya merupakan elit lokal Maluku Utara, yang pengaruh dan kapasitasnya paling besar dibandingkan dengan kontestan lainnya. Pertarungan antara Abdul Gaffur dan Thaib Armayin, beserta para pendukungnya yang merupakan elit lokal, dalam Pilkada Malut 2007-2008, dipenuhi oleh konflik politik, dan terbungkus dalam tiga asumsi besar, yaitu; (1) Kontestasi masa lalu Abdul Gaffur dan Thaib Armayin yang berangkat dari Pilkada Malut 2001-2002; (2) Pertaruhan harga diri dalam perebutan jabatan politik disatu sisi dan mempertahankannya disisi yang lain; (3) Kutubnisasi dan konflik dari elit lokal yang mencoba mengambil keuntungan, bila salah satu dari kedua aktor ini duduk sebagai Gubernur. Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul "Konflik Elit Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara 2007-2008".

KERANGKA TEORITIK

Konsep yang digunakan adalah (1) konsep konflik elit, berguna untuk menjelaskan pertarungan antara elit lokal, dalam bingkai persaingan antara Abdul Gaffur dan Thaib Armayin, dan (2) konsep konflik politik sebagai penjelasan, bahwa Pilkada menjadi ajang pertarungan atau arena konflik bagi para elit.

1. Konflik Elit

Sulit dipungkiri bahwa dengan mudah di masyarakat dapat ditemukan adanya sekelompok individu yang mempunyai peran dan pengaruh lebih besar apabila dibandingkan dengan peran dan pengaruh yang dimiliki individu-individu yang lainnya. Mereka mempunyai kemampuan untuk memainkan peran dan pengaruh tersebut karena keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. Dengan keunggulan-keunggulan yang melekat pada dirinya, mereka dapat mengelola dan mengendalikan cabang kehidupan tertentu, dimana pada gilirannya yang bersangkutan akan dapat memainkan peran dan pengaruhnya tersebut untuk menentukan corak dan arah bergulirnya roda kehidupan masyarakat (Haryanto, 2005; 63).

2. Konflik Politik

Secara umum konflik dalam Pilkada merupakan konflik politik. Karena dalam Pilkada terjadi pertarungan atau perebutan kekuasaan secara legal, yang diatur oleh undang-undang dan melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Konflik politik, menurut Surbakti (2007; 151), terjadi karena pihak yang berkonflik meminta pemerintah membuat keputusan yang adil. Atau terjadi campur tangan pemerintah dalam konflik tersebut, karena kalau tidak cepat dan tepat ditangani, dapat mengganggu kepentingan umum. Secara umum sejumlah konflik bisa dikatakan konflik politik, karena langsung melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan.

Secara longgar konflik politik adalah, perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah (yang dimaksud pemerintah, meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif). Sebaliknya secara sempit konflik politik adalah kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara partisipan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dengan jenis penelitian deskriptif-eksploratif. Adapun lokasi penelitian adalah Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu; data primer berupa wawancara dengan responden yang dianggap representatif dan data sekunder dari literatur dan data pustaka yang relevan. Pengumpulan datanya menggunakan metode kajian literatur dan wawancara. Sedangkan untuk analisa data, data yang sudah diperoleh di lapangan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran informasi masalah secara jelas dan mendalam dengan menggunakan teori-teori konflik elit dan politik sebagai alat interpretasi terhadap data yang diperoleh.

HASIL DAN ANALISIS

1. Konfigurasi Elit Lokal Maluku Utara

Konfigurasi elit lokal di Maluku Utara terbagi dalam tiga bagian besar yakni, (1) Elit tradisional yang terdiri dari kesultanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat (etnis); (2) Elit baru yang terdiri dari elit politik dan elit pemerintahan (birokrat); (3) Elit lokal Maluku Utara dalam Pilkada Malut 2007-2008, yang terdiri dari kubu Thaib Armayin-Gani Kasuba dan kubu Abdul Gaffur-Abdur Rahim Fabanyo.

a. Konfigurasi Elit Tradisional Maluku Utara

Kesultanan - Maluku Utara memiliki sejarah panjang tentang empat kesultanan yang dimilikinya, yaitu Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Tidore. Dalam sistem pemerintahan tradisional, lembaga kesultanan mempunyai peran sebagai penyelenggara pemerintahan, dalam bentuk kerajaan atau Kesultanan Islam. Memasuki zaman kemerdekaan, peran dari lembaga kesultanan masih terasa dominan, walaupun dengan lingkup yang lebih terbatas, dominasi lembaga kesultanan setidaknya masih terasa hingga akhir 1950-an, dengan peran mereka sebagai kepala daerah di wilayah Maluku Utara. Baru pada 1960-lah peran lembaga kesultanan memudar. Ini ditandai dengan terpilihnya Jahir Anong sebagai Bupati Maluku Utara. Dengan peran yang semakin memudar, lembaga kesultanan di Maluku Utara akhirnya muncul dalam bentuk individu-

individu (Sultan) yang mencoba bertahan dengan memanfaatkan dukungan dari massa adatnya, dalam memperebutkan jabatan-jabatan politik yang ada di Maluku Utara.

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Etnis) - Terdapat empat agama besar yang ada di Maluku Utara yang secara berurutan, yaitu Islam, Kristen, Katholik, dan Hindu. Sedangkan dalam komposisi etnis, ada empat etnis besar yang mendiami wilayah ini, yaitu, etnis Makian, Tobelo/Galela, Sanana, dan Ternate/Tidore. Keberadaan agama dan etnis mayoritas ini, tentunya memunculkan mereka sebagai kekuatan tersendiri, yang kemudian menjelma sebagai elit tradisional. Apalagi representasi dari agama dan etnis mayoritas ini, kemudian berada dan menguasai jabatan-jabatan penting, dalam bidang politik, dan pemerintahan di Maluku Utara.

b. Konfigurasi Elit Baru Maluku Utara

Elit Politik - Maluku Utara merupakan salah satu lumbung suara Partai Golkar yang masih tetap ada dan bertahan sampai saat ini. Dominasi Golkar di Maluku Utara sudah dimulai sejak 1971 dan terus berlanjut hingga 2004. Dominasi Golkar di Maluku Utara, khususnya pada masa Orde Baru ditunjukkan dengan selalu menguasai kursi Bupati Maluku Utara, oleh TNI AD. Secara langsung, dominasi Golkar di Maluku Utara, menjadikan partai tersebut sebagai elit lokal, baik sebagai institusi atau sebagai personal bagi individu-individu yang bernaung di bawah partai ini.

Elit Pemerintahan (Birokrat) - Sebagian besar orang Maluku Utara pada umumnya masih mengidolakan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (birokrat). Pekerjaan ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat memberikan jaminan uang pensiun dan masa depan yang lebih baik. Apalagi dengan sistem desentralisasi, posisi birokrat pada umumnya didominasi oleh putra daerah, yang tentunya secara emosional dekat dengan masyarakat sekitar. Sehingga para birokrat, mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi, dalam memperebutkan jabatan-jabat politik di Maluku Utara, setidaknya hal ini dibuktikan oleh Thaib Armayin dalam keberhasilannya menduduki kursi Gubernur Maluku Utara dua kali berturut-turut.

c. Konfigurasi Elit Lokal Maluku Utara Dalam Pilkada Malut 2007-2008

Tanpa bermaksud mengesampingkan calon gubernur dan wakil gubernur lainnya yang bertarung dalam Pilkada Malut 2007-2008, sesungguhnya pertarungan hanya terjadi antara pasangan Thaib Armayin-Gani Kasuba melawan pasangan Abdul Gaffur-Abdur

Rahim Fabanyo. Ini terbukti dengan terciptanya dua kubu besar, yaitu kubu Thaib Armayin-Gani Kasuba dan kubu Abdul Gaffur-Abdur Rahim Fabanyo yang menarik sebagian besar dukungan masyarakat, elit eksekutif, elit legislatif, elit politik, dan juga elit lainnya, untuk bergabung ke dalam salah satu dari kedua kubu ini. Bahkan dua kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang lainnya, juga turut tersedot kedalam salah satu kubu ini.

2. Arena dan Akar Konflik Elit di Maluku Utara

a. Arena Konflik Elit Lokal di Maluku Utara

Arena konflik elit di Maluku Utara terbagi dalam tiga arena, yaitu, (1) Arena-arena lainnya, dalam arena ini, konflik yang terjadi masih dalam skala kecil; (2) Pembentukan Provinsi Maluku Utara 1999; (3) Pemilihan kepala daerah Maluku Utara 2001-2002 dan 2007-2008. Arena yang kedua dan ketiga, terjadi dalam skala dan intensitas yang lebih besar.

Konflik yang terjadi dalam arena ini berlangsung dalam skala yang lebih kecil, bersifat laten dan tidak menimbulkan efek yang negatif. Arena tersebut antara lain: (1) Perang statemen di media massa antara elit lokal; (2) Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang kadang tidak sejalan dengan pemerintah kabupaten dan kota; (3) Pertarungan antara partai politik yang terbungkus dalam pertarungan antara kepala-kepala daerah yang ada di Maluku Utara; (4) Persaingan empat etnis besar di Maluku Utara dalam struktur masyarakat, pemerintahan, dan politik.

Pembentukan Provinsi Maluku Utara 1999. Dalam pembentukan Provinsi Maluku Utara, konflik yang terjadi adalah seputar perjuangan aspirasi rakyat Maluku Utara, untuk membentuk Provinsi sendiri, yang telah dimulai sejak 1957 dan baru terrealisasi pada tahun 1999. Arena ini kemudian menjadi konflik antara elit lokal, ketika ada gesekan elit lokal yang mendukung dan menentang pembentukan Provinsi Maluku Utara. Di samping itu, konflik juga terjadi ketika terdapat perbedaan mengenai letak Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, yang kemudian disepakati ibu kota sementara Provinsi Maluku Utara adalah Ternate, untuk kemudian secara definitif pindah ke Sofifi.

Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara 2001-2002 dan 2007-2008. Pilkada Malut 2001-2002 dan 2007-2008 pada dasarnya sama seperti Pilkada lainnya di Indonesia, dimana

Pilkada merupakan salah satu arena kontestasi antara elit lokal, guna mencari pemimpin daerah. Namun, yang terjadi dalam Pilkada Malut 2001-2002 dan 2007-2008 berbeda dari Pilkada lainnya yang ada di Indonesia. Pilkada Malut 2001-2002 dan 2007-2008 menjadi Pilkada yang terlama di Indonesia, dengan memakan waktu lebih dari satu tahun untuk menentukan siapa pemenang Pilkada tersebut, dan tentunya menjadi bagian paling kelam dalam sejarah Maluku Utara.

b. Akar Konflik Elit Lokal di Maluku Utara dalam Pilkada Malut 2007-2008

Akar konflik elit lokal di Maluku Utara dalam kaitannya dengan konflik elit lokal dalam Pilkada Malut 2007-2008 dapat dijelaskan dengan tiga kejadian yang saling berkaitan satu sama lainnya dan bersifat turunan: (1) Pembentukan Provinsi Maluku Utara tahun 1999; (2) Persaingan elit lokal yang berada di belakang sosok Abdul Gaffur dan juga Thaib Armayin, (3) Pilkada Malut 2001-2002.

Pembentukan Provinsi Maluku Utara 1999. Saat terjadi ide pemekaran Provinsi Maluku Utara pada 1999, mayoritas elit lokal pada waktu itu seperti Thaib Armayin, Syamsir Andili, dan Bahar Andili mendukung adanya pembentukan Provinsi Maluku Utara dan ikut berjuang agar pembentukan Provinsi Maluku Utara segera terwujud. Posisi sebaliknya justru diambil oleh Abdul Gaffur yang tidak memberikan sumbangsih dan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Maluku Utara. Tidak adanya dukungan dan sumbangsih dari Abdul Gaffur dalam pembentukan Provinsi Maluku Utara inilah yang kemudian dijadikan salah satu senjata musuh-musuh politik Abdul Gaffur untuk menjegal dan menyudutkannya dalam Pilkada Malut 2001-2002 dan 2007-2008.

Persaingan Elit Lokal di Belakang Abdul Gaffur dan Thaib Armayin. Abdul Gaffur dan Thaib Armayin yang berasal dari latar belakang berbeda, selalu bertemu dalam dua kali Pilkada Malut, baik pada 2001-2002 maupun 2007-2008. Elit-elit lokal yang berada di belakang Abdul Gaffur dan Thaib Armayin kemudian menciptakan konflik tersendiri untuk mendudukan kandidat mereka sebagai Gubernur Maluku Utara. Di antara sekian gerbong/elit yang mendukung Abdul Gaffur dan Thaib Armayin, pertarungan paling nyata terlihat dari persaingan yang terjadi antara Partai Golkar dipihak Abdul Gaffur dan Partai Penguasa (Demokrat) di pihak Thaib Armayin. Persaingan antara Partai Golkar sebagai

partai nomor satu di Maluku Utara melawan Partai Penguasa, pada akhirnya turut andil dalam menciptakan konflik dalam Pilkada Malut 2001-2002 dan 2007-2008.

Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara 2001-2002. Pilkada Malut 2001-2002 merupakan arena yang secara nyata dan tegas memisahkan Abdul Gaffur dan Thaib Armayin, untuk pertama kalinya sebagai kompetitor. Dalam Pilkada Malut 2001-2002, pemilihan harus dilaksanakan dan diulang sampai tiga kali, yang akhirnya memunculkan nama Thaib Armayin dan Madjid Abdulah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Pada Pemilihan I (5 Juli 2001) dimenangkan oleh pasangan Abdul Gaffur dan Yamin Tawari (dicalonkan Fraksi Golkar). Pemilihan II (7 Maret 2001) dimenangkan oleh pasangan Thaib Armayin dan Yamin Waisale (dicalonkan Fraksi Partai Reformasi). Pemilihan III/terakhir (28 Oktober 2002) dimenangkan oleh Thaib Armayin dan Madjid Abdullah (dicalonkan Fraksi PDIP).

Kemenangan sah Abdul Gaffur pada pemilihan I yang kemudian dibatalkan oleh DPRD Malut dan memunculkan nama Thaib Armayin sebagai gubernur, merupakan sebuah kenangan buruk bagi Abdul Gaffur terhadap Thaib Armayin. Jadi, tidaklah mengherankan bila pertemuan kembali Abdul Gaffur dan Thaib Armayin dalam Pilkada Malut 2007-2008 berlangsung dalam atmosfer politik yang lebih panas dan diwarnai aroma balas dendam.

3. Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara 2007-2008: *Rematch* Abdul Gaffur Versus Thaib Armayin

Sebagaimana proses Pilkada Malut 2001-2002 yang tidak mulus, karena terjadi konflik antara elit lokal saat itu, Pilkada Malut 2007-2008 pun mengalami hal yang serupa dan berjalan tidak lancar, sehingga memakan waktu sampai satu tahun lebih. Dalam Pilkada Malut 2007-2008 ini, kembali lagi mempertemukan Abdul Gaffur dan Thaib Armayin dalam satu arena. Konflik di antara keduanya beserta elit lokal di belakang mereka, setidaknya dapat dijelaskan dengan tiga titik konflik yang terjadi dalam skala besar, yaitu; (1) Jadwal kampanye Pilkada Malut 2007-2008; (2) Rekapitulasi suara; dan (3) Gugatan Thaib Armayin dan KPUD Malut.

a. Jadwal Kampanye Pilkada Malut 2007-2008

Tahapan jadwal kampanye Pilkada Malut 2007-2008 yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPUD Malut adalah 8 Oktober 2007 sampai dengan 21 Oktober 2007. Masa tenang 22 Oktober 2007 sampai dengan 24 Oktober 2007 dan hari pemungutan suara pada 25 Oktober 2007. Namun, jadwal tersebut mendapat penolakan yang kuat dari tiga calon gubernur (Cagub) dan calon Wakil Gubernur (Cawagub) yang, sedangkan dukungan terhadap jadwal tersebut hanya datang dari pasangan Thaib Armayin-Gani Kasuba.

Penolakan tahapan jadwal kampanye Pilkada yang dimotori oleh pasangan Abdul Gaffur-Abdur Rahim Fabanyo ini, selain dikarenakan bertepatan dengan bulan puasa, juga diindikasikan bernuansa politis untuk melemahkan posisi Thaib Armayin yang bertarung sebagai *incumbent*. Walaupun pada awalnya KPUD Malut bersikukuh untuk tidak merubah tahapan jadwal kampanye Pilkada, namun akhirnya KPUD Malut tunduk pada desakan yang begitu kuat dari sebahagian besar kontestan Pilkada Malut 2007-2008. Selanjutnya KPUD Malut mengeluarkan keputusan bernomor 270/335/KPU/2007, yang isinya mengubah jadwal tahapan kampanye Pilkada Malut menjadi, kampanye dimulai pada 17 Oktober 2007 sampai dengan 30 Oktober 2007. Masa tenang 31 Oktober 2007 sampai 2 November 2007, dan hari pemungutan suara pada 3 November 2007.

b. Rekapitulasi Suara

Rekapitulasi suara Pilkada Malut 2007-2008 sebelumnya telah dijadwalkan oleh KPUD Malut berlangsung selama tiga hari, mulai dari 7 November 2007 sampai dengan 9 November 2007. Tercatat KPUD Kota Tidore Kepulauan, merupakan KPUD Kabupaten/Kota pertama yang memasukkan hasil rekapitulasi suara Cagub dan Cawagub Malut ke KPUD Malut, 8 November 2007. Sedangkan KPUD Kabupaten Halmahera Barat memasukkan hasil rekapitulasi suara Cagub dan Cawagub Malut ke KPUD Malut, pada 11 November 2007 dan merupakan KPUD Kabupaten/Kota terakhir, yang memasukkan hasil rekapitulasi.

Masalah kemudian muncul ketika KPUD Malut mempermasalahkan rekapitulasi suara di Kabupaten Halmahera Barat, dan kemudian KPUD Malut berinisiatif untuk melakukan pleno rekapitulasi ulang di kabupaten tersebut. Hasil rekapitulasi KPUD Malut ini kemudian berbeda dengan apa yang telah dihasilkan oleh KPUD Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya KPUD Malut melakukan rekapitulasi suara seluruh KPUD Kabupaten/Kota se-Provinsi Malut, yang pada perhitungan tersebut memunculkan nama pasangan

Thaib Armayin-Gani Kasuba sebagai pemenang Pilkada Malut 2007-2008 dengan jumlah perolehan suara sebesar 179.020 dan menyisihkan kandidat lainnya. Keputusan tersebut kemudian tertuang dalam Surat Keputusan KPUD Malut No. 20/KEP/PGWG/2007.

KPU Pusat sebagai lembaga yang berada di atas KPUD Malut, kemudian mengambil alih pelaksanaan Pilkada Malut 2007-2008. Pengambilalihan ini dikarenakan KPU Pusat beranggapan, KPUD Malut tidak bisa menyelesaikan tahapan Pilkada Malut 2007-2008 dengan baik. KPU Pusat kemudian melakukan pleno ulang, untuk menentukan pemenang Pilkada Malut 2007-2008. Dalam hasil pleno yang dilakukan KPU Pusat, pemenang Pilkada Malut jatuh pada pasangan Abdul Gaffur-Abdur Rahim Fabanyo dengan perolehan jumlah suara sebesar 181.889 suara dan tertuang dalam Surat Keputusan KPU Pusat N0. 27/15-BA/XI/2007, 22 November 2007. Hasil rekapitulasi suara Pilkada Malut 2007-2008 yang dilakukan oleh KPUD Malut dan KPU Pusat ini hasilnya berbeda satu sama lainnya, sehingga menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat dan juga kandidat yang bertarung.

c. Gugatan Thaib Armayin dan KPUD Malut

Pengambilalihan wewenang yang dilakukan oleh KPU Pusat terhadap KPUD Malut dan hasil rekapitulasi yang memenangkan pasangan Abdul Gaffur-Abdur Rahim Fabanyo, akhirnya mendapat tentangan dari KPUD Malut dan juga dari pasangan Thaib Armayin-Gani Kasuba. Kemudian baik Thaib Armayin-Gani Kasuba dan KPUD Malut, menggugat keputusan KPU Pusat melalui Mahkamah Agung (MA). Menanggapi gugatan yang dimasukkan oleh Thaib Armayin-Gani Kasuba dan KPUD Malut, pada 18 Januari 2008, MA mengeluarkan Surat Keputusan No. 03.P/KPUD/2007, yang intinya membatalkan semua keputusan KPU Pusat dan menghimbau agar KPUD Malut untuk sesegera mungkin melakukan penghitungan ulang di Kecamatan Jailolo, Ibu Selatan, dan Sahu Timur di Kabupaten Halmahera Barat.

Menindaklanjuti keputusan MA tersebut, baik KPUD Malut di bawah pimpinan Rahmi Husen dan KPUD Malut di bawah pimpinan Muchlis Tapi Tapi, melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara ulang. Dari dua penghitungan ulang dan rekapitulasi yang dilakukan KPUD Malut dengan dua pimpinan berbeda ini, kemudian mengeluarkan hasil yang berbeda pula. Hasil KPUD Malut dibawah pimpinan Rahmi Husen,

memenangkan pasangan Thaib Armayin-Gani Kasuba dengan perolehan suara sebesar 179.020 suara, sedangkan KPUD Malut Pimpinan Muchlis Tapi, memenangkan pasangan Abdul Gaffur-Abdur Rahim Fabanyo dengan jumlah suara sebesar 181.889 suara.

Menanggapi dua hasil berbeda dari dua kubu KPUD Malut yang juga berbeda, mengenai pemenang Pilkada Malut 2007-2008, pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri yang akhirnya berinisiatif untuk mengambil alih Pilkada Malut 2007-2008, untuk kemudian menetapkan siapa yang berhak memenangkan Pilkada Malut 2007-2008. Setelah melalui proses yang panjang dan juga berbagai pertimbangan pada 2 Juni 2008, Menteri Dalam Negeri (Depdagri) mengeluarkan penjelasan mengenai kisruh Pilkada Malut 2007-2008, yang kemudian memenangkan Pasangan Thaib Armayin-Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Pilkada Malut 2007-2008 yang berlangsung lebih dari satu tahun, kemudian berakhir pada 29 September 2008, dengan dilantiknya pasangan Thaib Armayin dan Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2008-2013 oleh Mendagri Mardiyanto.

KESIMPULAN

Walaupun eksistensi, pengakuan, dan keberadaan suatu elit, sangat bergantung pada massa, namun secara nyata posisi elit adalah sesuatu yang selalu berada di atas massa dan dominan lebih cenderung mempengaruhi massa. Ini dikarenakan elit memiliki sejumlah sumber daya, terutama materi dan sejumlah akses pembuatan kebijakan, yang sangat jarang dan mungkin saja tidak dimiliki oleh massa. Eksistensi elit lokal yang ada di Maluku Utara, selain karena adanya dukungan dari massa disekitar mereka, juga didukung dengan adanya arena kontestasi untuk menegaskan kapasitas dan pengaruh mereka terhadap massa.

Pilkada Malut 2001-2002 dan 2007-2008, yang mempertemukan Abdul Gaffur dan Thaib Armayin, kemudian menjadi arena kontestasi bagi keduanya untuk menegaskan posisi mereka sebagai elit lokal Maluku Utara. Dalam arena Pilkada yang memang merupakan sebuah kompetisi yang telah diatur dengan aspek *legal formal*, dan seharusnya menjadi salah satu instrumen penyelesai konflik, malah berubah menjadi instrumen penyebab konflik. Hal ini dikarenakan terjadinya gesekan kepentingan antara elit-elit lokal di Maluku Utara, dimana kepentingan tersebut saling berlawanan.

Sejatinya dalam Pilkada Malut 2001-2002 dan 2007-2008, kemenangan secara sah berada ditangan Abdul Gaffur, namun dikarenakan kedekatan Thaib Armayin dengan Penguasa (Presiden), bisa membuat Thaib Armayin akhirnya yang terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara dua kali berturut. Kejadian dalam Pilkada Malut, kemudian menegaskan, bahwa dalam Pilkada kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara yang didapat, tetapi juga sangat ditentukan dengan seberapa dekat seorang calon kepala daerah dengan “penguasa”.

DAFTAR PUSTAKA

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum. Nomor: 27/15-BA/XI/2007. Jakarta, 22 November 2007

Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta. Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007. Ternate, 16 November 2007
Penjelasan Menteri Dalam Negeri tentang Pilkada Maluku Utara 2 Juni 2008. Jakarta, 2 Juni 2008.

Surbakti, Ramlan (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Grasindo.